KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fadli Zon, Wakil ketua DPR: Tanda tangan Prasasti Tidak Wajib, Presiden Sudah Setuju Pembangunan Gedung DPR
Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

FADLI ZON, Wakil Ketua DPR

Tanda Tangan Prasasti Tidak Wajib, Presiden Sudah Setuju Pembangunan Gedung DPR

Meski Presiden Jokowi tidak menandatangani Prasasti tujuh proyek pembangunan DPR, bukan berarti rencana itu batal.

SEBAB, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Presiden sudah setuju pembangunan itu. Buktinya, sudah ada surat persetujuan resmi sejak setengah tahun lalu.

Setelah itu, lanjutnya, DPR langsung membentuk Tim Reformasi DPR untuk menginisiasi ide pembangunan tersebut.

Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 124 miliar untuk pembangunan museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, Alun-alun Demokrasi, gedung ruang tenaga ahli dan anggota dewan, serta kawasan pemukiman dewan.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau sudah setuju, kenapa Presiden tidak tanda tangan prasasti itu?

Memang saat itu kita ada dua opsi. Kita minta untuk tanda tangan atau tidak.

Bagaimana dengan prasasti yang kosong tanda tangan itu?

Kan tidak wajib.

Apa ada rencana minta tanda tangan lagi?

Oh nanti, kalau sudah ada kejelasan. Ini kan kita rencanakan persiapan dalam jangka pendek.

Apa sih sebenarnya yang dibicarakan ketika mengajak Presiden Jokowi masuk ke dalam museum?

Kita tadi cukup lihat banyak. Perjalanan parlemen sampai era reformasi, termasuk peserta-peserta Pemilu. Pak Jokowi dan Jusuf Kalla cukup lama mampir. Dari Pemilu 1955 beserta partainya, kan cukup aneh-aneh di situ karena itu Pemilu pertama diakui kedaulatannya. Dengan persiapan yang cukup matang, dan Pemilu yang cukup demokratis.

Mengenai penataan kawasan legislatif, tanggapan Presiden bagaimana?

Nggak ada masalah sih. Tinggal nanti step-stepnya kita rencanakan. Satu langkah awal yang sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Presiden. ■ SAR

> Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 124 miliar untuk pembangunan museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, Alun-alun Demokrasi, gedung ruang tenaga ahli dan anggota dewan, serta kawasan pemukiman dewan.

